

Receive : 06 May 2026
Revised : 18 May 2026
Accepted : 08 June 2026

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.120

Vol. 8 No. 1 June 2026, Hlm. 62-77



Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Di Desa Bale Dusun 5 Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala

***Aviliani, Elisabeth Josephine Topiu, Hasriani Hamun, Ni Made Rutini, Shafira
Anastasya, Muhammad Nashrudin**

Email : b10124115@untad.ac.id*

¹Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tadulako

ABSTRACT

This study aims to examine the forms and levels of community participation in strategic decision-making in Bale Village, Dusun 5, Tanantovea District, Donggala Regency, as well as to identify the factors that influence it. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that formal community participation has been fulfilled through Musrenbang forums and village deliberation mechanisms; however, substantive participation that enables citizens to exert real influence over decision-making has not yet been fully achieved. Based on the participation theory of Damanik and Weber (2006), community involvement in the planning, decision-making, and evaluation dimensions remains limited and is dominated by formal village actors. In contrast, the implementation dimension showed relatively positive outcomes, as evidenced by the successful completion of village infrastructure projects. Applying Simon's (1997) bounded rationality theory, the study also found that limitations in information, time, and cognitive capacity constitute the primary barriers in the decision-making process. The socio-economic conditions of the community, the majority of whom work as farmers from morning to afternoon, emerged as the most dominant structural factor hindering active citizen participation. The study recommends the development of adaptive participation mechanisms that accommodate residents' time constraints, strengthened information transparency, and the establishment of a more participatory and proactive program evaluation system

Keywords: Community Participation; Strategic Decision-Making; Village Governance

LATAR BELAKANG

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya dipandang sebagai hak, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan pemerintahan yang baik (UNDP, 1997).

Secara global, gerakan desentralisasi dan demokratisasi pemerintahan lokal telah mendorong negara-negara berkembang untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi warga dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Di Indonesia, semangat ini diwujudkan melalui reformasi tata kelola pemerintahan desa yang secara fundamental diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri, dengan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai prinsip

dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 54 UU Desa secara khusus mengatur penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat desa, yang wajib melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Secara etimologis, istilah "partisipasi" bermakna keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan. Namun dalam konteks ilmu sosial dan tata kelola pembangunan, maknanya jauh melampaui sekadar kehadiran fisik. Keterlibatan yang sesungguhnya mencakup dimensi mental dan emosional, di mana individu tidak hanya menyumbangkan tenaga, tetapi juga pikiran dan kehendaknya untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama. Dari perspektif psikologi organisasi, Keith Davis mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental, pikiran, dan perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan kontribusi nyata demi tercapainya tujuan bersama, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab atas proses dan hasil yang dicapai. Pandangan ini diperkuat oleh Gordon W. Allport yang berargumen bahwa keterlibatan yang sesungguhnya melampaui penyelesaian tugas biasa, karena ia menyentuh aspek identitas dan rasa memiliki individu terhadap kegiatan yang dijalankannya.

Dalam kerangka kebijakan publik di Indonesia, partisipasi masyarakat memiliki landasan hukum yang kuat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 secara eksplisit menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan dan keterlibatan aktif warga negara dalam keseluruhan proses perencanaan pembangunan. Konsep ini selaras dengan pandangan Alastaire White yang menekankan bahwa masyarakat bukan sekadar objek penerima kebijakan, melainkan memiliki hak dan kewenangan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan maupun implementasi program pembangunan yang langsung menyangkut kehidupan mereka (Sunarti, 2003). Sumarto (2003:17) menjelaskan partisipasi sebagai suatu proses di mana warga, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari organisasi sosial, mengambil peran untuk ikut memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Sementara itu, Pasaribu dan Simanjuntak melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih pragmatis, di mana masyarakat diharapkan hadir sebagai mitra aktif pemerintah, mengingat pembangunan yang dirancang dan dibiayai oleh pemerintah pada hakikatnya ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat (dalam Siti Fatimah, 2012:10).

Berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bersifat multidimensional dan tidak dapat diukur hanya dari satu aspek tunggal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori partisipasi yang dikembangkan oleh Damanik dan Weber (2006) dalam Setyaningsih (2009) sebagai kerangka analisis utama. Teori ini dipilih karena menawarkan dimensi pengukuran yang komprehensif, operasional, dan relevan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan proses pembangunan. Damanik dan Weber mengidentifikasi empat dimensi partisipasi yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses yang utuh, yaitu dimensi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, serta monitoring dan evaluasi.

Dimensi pertama adalah dimensi perencanaan, yang mengukur derajat keterlibatan masyarakat pada tahap awal sebelum suatu program atau kebijakan dijalankan. Indikator pada dimensi ini meliputi keikutsertaan dalam forum rapat perencanaan, kemampuan mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan sekitar, kebebasan dalam menyampaikan usulan dan saran, serta keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan bersama. Dimensi ini menjadi fondasi utama partisipasi, karena keterlibatan sejak tahap perencanaan menentukan arah

dan relevansi program yang akan dijalankan.

Dimensi kedua adalah dimensi pelaksanaan, yang mengukur sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam implementasi program atau kegiatan yang telah diputuskan bersama. Keterlibatan pada tahap ini mencerminkan kesungguhan dan komitmen masyarakat dalam mewujudkan keputusan yang telah disepakati menjadi tindakan nyata di lapangan. Tanpa partisipasi yang memadai pada tahap ini, program yang telah direncanakan berisiko tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dimensi ketiga adalah dimensi pemanfaatan hasil, yang mengukur keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan dan menikmati hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Dimensi ini juga mencakup pemerataan akses terhadap fasilitas dan manfaat pembangunan, serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hasil yang telah dicapai. Partisipasi pada dimensi ini menunjukkan sejauh mana program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dimensi keempat adalah dimensi monitoring dan evaluasi, yang mengukur keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan terhadap jalannya program bersama instansi terkait. Dimensi ini menjadi elemen

penutup yang sangat penting dalam siklus partisipasi, karena melalui pengawasan yang aktif, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap program yang telah ditetapkan diimplementasikan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Keempat dimensi ini secara keseluruhan membentuk kerangka analisis yang akan digunakan untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis sebagaimana menjadi fokus penelitian ini.

Pengambilan keputusan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia, baik pada level individu, organisasi, maupun masyarakat luas. Setiap keputusan yang diambil membawa konsekuensi yang berarti terhadap hasil yang diharapkan, sehingga prosesnya menuntut pertimbangan yang matang, baik secara rasional maupun intuitif. Secara umum, Robbins et al. (2014) mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau memanfaatkan peluang yang ada. Sementara itu, Bazerman dan Moore (2017) menegaskan bahwa pengambilan keputusan bukan sekadar aktivitas memilih, melainkan juga mencakup serangkaian proses pengumpulan informasi, analisis mendalam, dan evaluasi terhadap

berbagai konsekuensi yang mungkin timbul.

Dalam kajian ini, teori utama yang digunakan sebagai landasan analisis adalah teori bounded rationality yang dikembangkan oleh (Herbert A. Simon, 1997, dalam Pasolong, 2023). Simon berpendapat bahwa pengambil keputusan dalam organisasi tidak pernah benar-benar berada dalam kondisi rasionalitas penuh. Hal ini disebabkan oleh tiga keterbatasan mendasar yang selalu melekat, yaitu keterbatasan dalam memperoleh informasi yang lengkap, keterbatasan waktu dalam memproses pilihan, serta keterbatasan kapasitas kognitif manusia itu sendiri. Akibatnya, keputusan yang diambil bukanlah keputusan yang paling optimal secara absolut, melainkan keputusan yang dinilai "cukup memuaskan" atau dalam terminologi Simon disebut *satisficing*. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks administrasi publik, khususnya untuk memahami bagaimana pejabat maupun aparat pemerintahan merancang kebijakan dan memilih alternatif solusi di tengah situasi yang kompleks dan penuh keterbatasan.

Simon membagi proses pengambilan keputusan ke dalam tiga tahap utama. Tahap pertama adalah *intelligence*, yaitu tahap di mana pengambil keputusan mengenali dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungannya. Tahap kedua

adalah *design*, yakni proses merancang dan mengembangkan berbagai alternatif solusi yang mungkin diterapkan. Tahap ketiga adalah *choice*, yaitu tahap pemilihan alternatif yang dianggap paling layak dan memadai untuk diimplementasikan. Ketiga tahap ini membentuk sebuah alur yang sistematis, meskipun dalam praktiknya dapat berlangsung secara tidak linear tergantung pada kompleksitas masalah yang dihadapi.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Mintzberg dan Theoret (2006), yang membagi proses pengambilan keputusan strategis ke dalam tiga fase, yaitu identifikasi, pengembangan, dan pemilihan. Pada fase identifikasi, masalah dikenali dan didiagnosis secara mendalam. Pada fase pengembangan, berbagai solusi ditelusuri melalui dua cara, yakni pencarian (*search routine*) terhadap solusi yang sudah pernah ada, serta perancangan (*design routine*) terhadap solusi baru yang disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Adapun pada fase pemilihan, keputusan diambil melalui tiga cara: penilaian berdasarkan pengalaman atau intuisi, analisis alternatif secara logis dan sistematis, serta proses tawar-menawar ketika keputusan melibatkan banyak pihak. Fase ini terdiri atas tiga subfase, yaitu *screening*, *evaluasi*, dan *otorisasi*, sebelum keputusan akhirnya ditetapkan secara formal.

Dalam konteks pemerintahan desa, kerangka teori di atas menjadi sangat relevan. Pengambilan keputusan di tingkat desa merupakan implementasi nyata dari prinsip demokrasi dan otonomi desa, di mana keterbatasan informasi, sumber daya, dan kapasitas aparatur seringkali menjadi faktor penentu kualitas keputusan yang dihasilkan. Proses pengambilan keputusan strategis di desa mencakup berbagai ranah penting, antara lain perencanaan pembangunan desa melalui forum musyawarah tahunan, pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, penetapan peraturan desa yang melibatkan warga, serta pengelolaan aset desa baik berupa tanah, bangunan, maupun aset bergerak lainnya. Dalam seluruh proses tersebut, keterlibatan masyarakat menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas dan legitimasi keputusan yang diambil

Amanat partisipasi masyarakat diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, yang mewajibkan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa secara operasional mengatur mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes)

sebagai wadah resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat langsung dalam penentuan prioritas pembangunan. Kerangka regulatif ini secara kolektif menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan keharusan institusional yang harus dipenuhi dalam setiap proses pengambilan keputusan strategis di desa.

Namun demikian, pada tataran empiris, implementasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis di desa masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kehadiran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam Musyawarah Desa di berbagai daerah masih tergolong rendah, dengan rata-rata kehadiran warga hanya mencapai 30 hingga 40 persen dari total jumlah penduduk yang berhak hadir. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara mandat regulatif yang menghendaki partisipasi penuh dan realitas lapangan yang masih jauh dari harapan.

Di tingkat daerah, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam juga menghadapi persoalan serupa. Berdasarkan laporan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021, sebagian besar desa di wilayah ini masih mengalami keterbatasan dalam mengoptimalkan forum musyawarah desa sebagai ruang partisipasi yang inklusif. Ketimpangan akses informasi, dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak partisipasinya menjadi faktor-faktor yang secara konsisten menghambat terwujudnya partisipasi yang bermakna di tingkat desa.

Kondisi tersebut diduga turut terjadi di Desa Bale Dusun 5, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Sebagai desa yang berada di wilayah pedesaan dengan berbagai keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat dalam forum-forum pengambilan keputusan strategis desa belum berlangsung secara optimal. Proses pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan pembangunan, pengelolaan Dana Desa, dan penetapan prioritas program desa masih didominasi oleh segelintir pihak, sementara keterlibatan warga secara luas masih bersifat terbatas dan pasif. Kondisi ini berpotensi menghasilkan kebijakan desa yang tidak sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, sehingga efektivitas program pembangunan desa pun menjadi tidak maksimal

METODE

Untuk mengkaji secara mendalam bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis di Desa Bale Dusun 5, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang berlandaskan pada pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif dipandang sesuai karena, sebagaimana dijelaskan Sugiyono (2022), penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman tentang nilai suatu variabel secara berdiri sendiri tanpa perlu melakukan perbandingan antarvariabel. Sementara itu, pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami realitas sosial secara lebih utuh melalui proses pengamatan dan analisis mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk deskripsi naratif (Sugiyono, 2022). Sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif, keberadaan hipotesis tidak diperlukan dalam penelitian ini, sebagaimana ditegaskan Arikunto (2010), sehingga perhatian peneliti sepenuhnya diarahkan pada upaya memahami kondisi dan realitas partisipasi masyarakat sebagaimana adanya di lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang dihimpun secara langsung melalui interaksi dengan para informan, yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, serta

sejumlah warga yang dinilai relevan dengan fokus penelitian. Menurut Arikunto (2010), data primer adalah data yang berasal langsung dari subjek penelitian, baik berupa pernyataan lisan, sikap, maupun tindakan yang dapat diamati secara nyata di lapangan.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui tiga cara, yakni wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan guna memperoleh informasi yang kaya mengenai pandangan, pengalaman, serta penilaian informan terhadap pola dan mekanisme keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Observasi dijalankan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menyaksikan berbagai kegiatan musyawarah dan forum warga yang diselenggarakan di Desa Bale Dusun 5, sehingga diperoleh data yang bersifat faktual dan kontekstual. Adapun dokumentasi dimanfaatkan sebagai sarana pengumpulan bahan-bahan tertulis dan visual, seperti foto, catatan administrasi, serta dokumen resmi lainnya yang mampu mendukung keabsahan temuan penelitian.

Analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang mencakup tiga langkah pokok, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini tidak berjalan secara linier melainkan berlangsung secara siklis dan terus-

menerus sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian dinyatakan selesai. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu menghadirkan deskripsi yang mendalam, akurat, dan komprehensif mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis di Desa Bale Dusun 5, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala.

PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini bertujuan untuk menyelaraskan kerangka teoretis dengan temuan empiris yang diperoleh dari hasil wawancara di Lapangan. Hasil wawancara memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kehidupan dan tata kelola pemerintahan di Desa Bale, yang meliputi kondisi demografi-ekonomi, partisipasi masyarakat, pembangunan infrastruktur, kebijakan bantuan sosial, tantangan pendidikan, dan mekanisme penyelesaian masalah. Setiap temuan akan dianalisis menggunakan dimensi teori partisipasi dari Damanik dan Weber (2006) serta dimensi teori pengambilan keputusan dari (Herbert A. Simon 1997, dalam Pasolong,2023).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memiliki latar belakang pendidikan dasar dan menggantungkan hidup sebagai petani kemiri, cokelat, cabai, serta kelapa. Kondisi ini sangat relevan dengan analisis partisipasi dan pengambilan

keputusan, karena menentukan kapasitas dan keterbatasan masyarakat dalam berpartisipasi.

Pendidikan dasar yang dimiliki masyarakat menunjukkan keterbatasan kapasitas teknis untuk berpartisipasi dalam perencanaan yang kompleks. Sementara itu, pekerjaan sebagai petani menciptakan tekanan waktu yang ketat, karena warga harus bekerja di kebun dari pagi hingga malam. Kondisi sosial-ekonomi ini menjadi faktor struktural yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam setiap dimensi.

Berdasarkan Teori Partisipasi oleh Damanik dan Weber ada 4 dimensi yang mendukung dalam penelitian yaitu :

1. Dimensi Perencanaan (Tahap Perencanaan)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Musrenbang telah dilaksanakan sebagai forum untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Namun, kesibukan bekerja di kebun dari pagi hingga malam menjadi kendala utama rendahnya partisipasi warga. Kondisi ini menyyata bahwa partisipasi dalam identifikasi masalah masih terbatas pada kelompok tertentu, terutama tokoh formal seperti RT, Kepala Daven, dan BPD.

Dari perspektif dimensi perencanaan, proses identifikasi masalah belum melibatkan masyarakat secara luas. Warga biasa yang tidak dapat hadir karena pekerjaan tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan

kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi secara langsung. Kondisi ini menunjukkan defisit dalam participation pada tahap identifikasi masalah. Forum Musrenbang juga menjadi wadah untuk membahas berbagai alternatif solusi pembangunan. Akan tetapi, rendahnya keterlibatan masyarakat menyebabkan alternatif yang dibahas lebih banyak berasal dari kelompok elit desa dibandingkan dari warga secara umum. Kondisi tersebut diperkuat oleh adanya perbedaan pandangan antara pemerintah desa dan masyarakat. Aparatur desa menilai proses perencanaan berjalan secara terbuka, sedangkan sebagian warga merasa aspirasinya belum terakomodasi secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan alternatif solusi masih cenderung bersifat top-down dibandingkan partisipatif.

Penetapan prioritas pembangunan dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, ketersediaan anggaran, serta regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Meskipun mekanisme tersebut telah mengikuti prosedur yang berlaku, tidak seluruh kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam program prioritas desa. Keluhan mengenai distribusi bantuan sosial yang dianggap belum merata menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan prioritas yang

ditetapkan dalam kebijakan pembangunan.

2. Dimensi Pelaksanaan (Tahap Pemanfaatan/Pembangunan)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa berbagai program infrastruktur berhasil direalisasikan dengan baik. Pembangunan jembatan baru mampu meningkatkan keselamatan masyarakat ketika melintasi sungai pada musim hujan. Selain itu, pembangunan jaringan air bersih, tandon air, serta layanan Posyandu keliling memberikan kemudahan akses bagi warga yang tinggal jauh dari pusat desa.

Keberhasilan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif meskipun tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan masih terbatas.

Meskipun pembangunan fisik berjalan cukup baik, penelitian belum menemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Padahal, keberlanjutan manfaat infrastruktur sangat bergantung pada peran masyarakat dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Oleh karena itu, aspek monitoring dan pemeliharaan masih menjadi kelemahan dalam dimensi pelaksanaan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

3. Dimensi Pengambilan Keputusan (Tahap Pembuatan Kebijakan)

Keputusan strategis di tingkat desa umumnya dihasilkan melalui musyawarah yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh agama, dan tokoh adat. Mekanisme ini menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Namun demikian, dominasi aktor formal masih terlihat cukup kuat. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa bah

Kemampuan masyarakat umum untuk mempengaruhi keputusan desa masih relatif terbatas. Peran yang lebih dominan tetap berada pada pihak-pihak yang memiliki posisi struktural dalam pemerintahan desa, seperti RT, kepala dusun, dan BPD. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat administratif atau formal, sementara pengaruh substantif terhadap kebijakan belum sepenuhnya terwujud.

4. Dimensi Evaluasi (Tahap Evaluasi)

Penelitian menunjukkan bahwa desa telah memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang berlangsung secara berjenjang, mulai dari tingkat RT, kepala dusun, hingga kepala desa. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan memperoleh tindak lanjut dari pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa dinilai cukup responsif terhadap berbagai persoalan yang muncul, seperti

perbaikan pipa air yang bocor maupun pelaksanaan fogging ketika terjadi peningkatan kasus malaria.

Walaupun mekanisme pengaduan telah tersedia, keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program secara sistematis masih belum optimal. Evaluasi yang dilakukan cenderung bersifat reaktif, yakni merespons masalah setelah muncul, dibandingkan melakukan evaluasi berkala untuk mencegah munculnya persoalan. Keluhan mengenai bantuan sosial yang tidak merata menjadi indikator bahwa proses evaluasi belum mampu mendeteksi dan menyelesaikan masalah secara preventif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam teori partisipasi belum sepenuhnya berjalan di Dusun 5 Desa Bale, karena banyaknya masyarakat dusun 5 yang bekerja sebagai pekebun dari pagi hingga sore hari yang pada akhirnya mengurangi partisipasi dalam pembuatan perencanaan dan pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini terdapat juga teori pengambilan keputusan oleh Herbert A. Simon yang di dalamnya ada 3 dimensi dan 1 dimensi tambahan yaitu:

1. Dimensi Intelligensi (Intelligence)

Dalam tahap intelligensi, pemerintah desa menghadapi keterbatasan informasi tentang kondisi riil warga. Kesibukan warga bekerja di kebun menyebabkan rendahnya partisipasi dalam forum-forum formal,

yang menjadi sumber informasi bagi pemerintah desa.

Kondisi dualisme pandangan menunjukkan bahwa kedua belah pihak beroperasi dengan informasi yang berbeda. Perangkat desa menilai forum berjalan lancar karena informasi yang mereka terima dari forum formal. Warga biasa merasa aspirasi kurang terdengar karena tidak memiliki channel efektif untuk menyampaikan informasi.

2. Dimensi Desain (Design)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa mengembangkan berbagai alternatif untuk mengatasi masalah. Untuk tantangan pendidikan, pemerintah desa memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan secara massal dan menyediakan program Kejar Paket A hingga C. Alternatif solusi ini menunjukkan upaya kreatif untuk mengatasi keterbatasan dalam koridor yang tersedia. Programs dirancang untuk mengatasi hambatan struktural yang dihadapi warga.

Namun, pengembangan alternatif untuk bansos menghadapi keterbatasan eksternal yang signifikan. Pemerintah desa menjelaskan bahwa ketidakmerataan bansos akibat pemotongan anggaran Dana Desa yang drastis dan aturan kriteria penerima bantuan dari kementerian pusat yang kaku dan terus berubah-ubah. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain program menghadapi keterbatasan yang tidak

dapat dikendalikan di tingkat desa. Pemerintah desa harus beroperasi dalam koridor yang ditetapkan pusat, meskipun tidak sesuai dengan kondisi lokal.

3. Dimensi Pilihan (Choice)

Keputusan-keputusan strategis dirumuskan melalui musyawarah untuk mufakat dengan menomorsatukan skala prioritas kebutuhan masyarakat dan batas regulasi anggaran dari pusat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemilihan didasarkan pada ketersediaan anggaran, bukan hanya pada kebutuhan. Pemilihan tidak selalu mengandalkan pemungutan suara terbanyak, melainkan mencari mufakat melalui musyawarah. Pendekatan ini menunjukkan dominasi rasionalitas prosedural—keputusan lebih didasarkan pada legitimasi proses daripada pada optimalitas teknis.

Simon (1997) mengajukan konsep *satisfying*—menerima solusi yang "cukup baik"—dibandingkan dengan *optimizing*—mencari solusi terbaik. Pendekatan ini relevan untuk memahami pengambilan keputusan di lapangan. Dualisme pandangan menunjukkan bahwa perangkat desa sudah merasa memenuhi standar yang dapat diterima (*satisfying*), sementara warga biasa mengharapkan lebih banyak (*optimizing*). Ekspektasi yang berbeda ini menciptakan kesenjangan persepsi.

4. Dimensi Implementasi (Implementation)

Hasil wawancara menunjukkan keberhasilan dalam implementasi infrastruktur. Jembatan baru, proyek pipa air bersih, dan Posyandu keliling berhasil diselesaikan dan memberikan manfaat nyata bagi warga. Penanganan pipa bocor dan fogging massal saat wabah malaria menunjukkan kemampuan implementasi dalam kondisi darurat. Pemerintah desa menunjukkan responsivitas tinggi dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat.

Namun, implementasi bansos menghadapi tantangan. Keluhan warga lansia tentang ketidakmerataan menunjukkan bahwa implementasi tidak selalu sesuai dengan rencana karena keterbatasan eksternal (pemotongan anggaran dan perubahan kriteria). Keterbatasan sumber daya juga mempengaruhi implementasi. Pemerintah desa dengan perangkat yang terbatas harus mengelola berbagai program secara simultan, yang berdampak pada kualitas implementasi.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa temuan atau hasil untuk menutup pembahasan dalam penelitian ini. Berdasarkan analisis dimensi partisipasi dan dimensi pengambilan keputusan, temuan utama dapat disintesis sebagai berikut:

1. Pertama, partisipasi dalam dimensi perencanaan masih

- terbatas. Forum Musrenbang telah dilaksanakan secara formal, tetapi partisipasi substantif dari warga biasa sangat terbatas karena kesibukan bekerja. Identifikasi masalah, perumusan alternatif, dan penentuan prioritas masih didominasi oleh struktur formal.
2. Kedua, partisipasi dalam dimensi pelaksanaan relatif berhasil. Proyek infrastruktur berhasil diselesaikan dan memberikan manfaat nyata. Namun, partisipasi dalam monitoring dan pemeliharaan belum teridentifikasi dengan jelas.
 3. Ketiga, partisipasi dalam dimensi pengambilan keputusan belum substantif. Warga biasa merasa aspirasi mereka kurang terdengar dan tidak memiliki pengaruh nyata pada keputusan. Keputusan didominasi oleh struktur formal melalui musyawarah untuk mufakat.
 4. Keempat, partisipasi dalam dimensi evaluasi masih terbatas. Mekanisme evaluasi lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Keluhan warga lansia tentang bansos menunjukkan bahwa evaluasi tidak proaktif mengidentifikasi masalah.
 5. Kelima, dimensi inteligensi menghadapi keterbatasan informasi karena rendahnya

partisipasi dalam forum formal. Dualisme pandangan menunjukkan bahwa kedua belah pihak beroperasi dengan informasi yang berbeda.

6. Keenam, dimensi desain menghadapi keterbatasan eksternal seperti pemotongan anggaran dan perubahan kriteria pusat. Alternatif solusi dikembangkan dalam koridor yang tersedia.
7. Ketujuh, dimensi pilihan menunjukkan dominasi rasionalitas prosedural. Keputusan lebih didasarkan pada legitimasi proses melalui musyawarah untuk mufakat, bukan pada optimalitas teknis.
8. Kedelapan, dimensi implementasi relatif berhasil untuk infrastruktur dan respoa darurat, tetapi menghadapi tantangan untuk program bansos karena keterbatasan eksternal.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap temuan hasil wawancara menggunakan dimensi teori partisipasi Damanik dan Weber serta dimensi teori pengambilan keputusan Simon, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis di Tingkat Desa menghadapi berbagai tantangan struktural yang berakar pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Receive : 06 May 2026

Revised : 18 May 2026

Accepted : 08 June 2026

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.120

Partisipasi formal sudah terpenuhi melalui forum Musrenbang dan mekanisme musyawarah, tetapi partisipasi substantif yang memungkinkan pengaruh nyata pada keputusan belum tercapai. Kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan informasi, kognitif, dan waktu yang menjadi karakteristik bounded rationality dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa implementasi dapat berjalan dengan baik meskipun partisipasi terbatas. Namun, keluhan tentang ketidakmerataan bansos dan rendahnya kesadaran pendidikan menunjukkan bahwa tantangan masih signifikan, terutama dalam dimensi yang melibatkan partisipasi substantif dari masyarakat.

Penelitian ini mengharapkan rekomendasi untuk peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan waktu karena tekanan ekonomi. Perbaikan mekanisme partisipasi perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi, dengan mengakomodasi keterbatasan yang ada tanpa mengorbankan substantif partisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar. (2021). PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.

Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Allport, G.W. (1945). Psikologi Partisipasi. *Psychological Review*, 53(3), 117-132
<https://doi.apa.org/doi/10.1037/h0056704>

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah. (2023). *Rencana kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023*. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. [RENJA PMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023](#)

Duarmas, D., Rumapea, P., & Rompas, W. Y. (2016). Prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(46).

Finarsih, E. W. (2016). Model pengambilan keputusan strategis pada perusahaan media radio independent dan group. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 4(2).

Finarsih, E.Y. (2016). MODEL PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1-11.

Ibori, A. (2014). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung di Desa Tembuni Distrik

Receive : 06 May 2026

Revised : 18 May 2026

Accepted : 08 June 2026

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.120

- Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1).
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kharisma, N. I., & Senjawati, N. D. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata "Dewi Flory" di Kalurahan Jugang, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 235–245.
- Khikmawanto. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (Studi pada Kampung Tematik "Talas" Pasar Baru Kota Tangerang. *Jurnal Mozaik*, 1-13.
- Maylanie, J. T. (2022). Tahapan Pengambilan Keputusan (Kajian Teoritis dari James A. F. Stoner). *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 263-274.
- Pasolong, H. (2023). *Teori Pengambilan Keputusan*. Bandung: Alfabeta.
- Pratama, A. A., M. Ardiansyah. (2022). SISTEM PERAN SERTA PEMERINTAH BERSAMA. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains*, 7(1), 17-28.
- Putri, U. A., & Ali, H. (2024). *Determinasi keunggulan kompetitif: Analisis pengambilan keputusan strategik, manajemen sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi*. Decision on Human and Public Sector (DHPS), 1(4). <https://doi.org/10.38035/dhps.v1i4>
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Safrin. (2025). *Teori Pengambilan Keputusan*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Selvia, F., Ayu, K. P., Bertho, E. M., & Pratama, R. (2025). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kotawaringin Timur Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 9(2), 1172–1181.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997).

Receive : 06 May 2026

Revised : 18 May 2026

Accepted : 08 June 2026

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v8i1.120

Governance for Sustainable Human
Development.

Widiyaningsih,A.E.,Muhammad,T.Y.

(2022). Partisipasi Masyarakat
Dalam Mewujudkan Desa Sadar
Kerukunan Antarumat Beragama
Di Desa. *Journal Of Civics And Moral
Studies*, 7(1),44-60.